

0	8	0	2	2	0	0	1	0	9	2	0	0	1	8	7	
Kode Fakultas		Kode PS/Bagian		Kode Publikasi		Kode Penulis		Tahun Publikasi		Kode Sumber Tulisan		Nomor Urut Publikasi dari Fakultas				

OPINI

SENIN, 04 MEI 2009

Media Muriawas

Kebijakan Pendidikan yang Pro-rakyat

(Refleksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional)

(Bagian I)

Oleh
ALFITRI

Dosen FISIP dan Magister Administrasi Publik
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Dalam setiap pesta demokrasi, baik pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), janji politik selalu ditawarkan pada saat tahapan kampanye oleh kandidat legislatif maupun kandidat eksekutif sebagai mekanisme ruang penilaian bagi publik terhadap calon pemimpin atau calon wakil rakyat.

Janji politik yang dibungkus dalam setiap kampanye politik, seyogyanya merupakan kontrak politik antara calon pemimpin atau wakil rakyat dengan konsituen pemilihnya. Bahkan, sekaligus komitmen moral sebagai calon pemimpin atau wakil rakyat, yang jika terpilih atau dipercaya mengemban amanah publik wajib untuk dipenuhi atau direalisasikan.

Realisasi janji politik tidak hanya dilihat sebagai kapabilitas seorang pemimpin, tetapi bagaimana indikator keberhasilan seorang pemimpin dalam membuktikan kemampuannya untuk disebut sebagai seorang pemimpin publik yang masuk kategori negarawan.

Hal ini berarti pemimpin yang dipercaya memimpin memiliki visi untuk mengangkat nasib rakyat melalui langkah-langkah kebijakan publik yang memang didasari oleh kebutuhan publik.

Kebijakan publik yang dilandasi oleh kebutuhan publik merupakan sebuah proses mekanis bagaimana publik menentukan sendiri terhadap apa yang diinginkan agar negara atau pemerintah mampu memahami kehendak publik.

Inilah esensi dari janji politik yang direalisasikan dalam bentuk kebijakan publik, bermakna bahwa pemimpin harus bisa menyerap aspirasi publik melalui fenomena dan problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai orang-orang yang paling tahu tentang kebutuhan mereka sendiri.

Penyerapan aspirasi publik yang dilakukan oleh seorang pemimpin publik akan sangat ditentukan oleh kepaiawain sang pemimpin dalam menjalankan logika manajerial kepemimpinan.

Oleh sebab itu, warna kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat adalah kunci utama dalam memperbaiki nasib rakyat, sehingga dalam berbagai versi disebut sebagai kebijakan *pro poor*.

Menurut Tarmizi Ramadan *Pro poor* merupakan bagian dari kebijakan publik pemerintah (Gubernur Sumsel) yang diterjemahkan ke dalam program berobat gratis, sekolah gratis, rumah sehat untuk warga miskin dan guru.

Ia mengajak semua bupati dan wali kotanya untuk berpihak ke rakyat dalam menjalankan program kerjanya.

Apabila bupati/walikota tidak mau mendukung program ini, ia akan diancam untuk didemo rakyatnya sendiri, agar tidak terpilih lagi atau diturunkan saja, meski jabatannya belum lima tahun.

Mengapa negara perlu berperan aktif dalam kebijakan sosial? Negara adalah institusi paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutu-

han dasarnya. Negaralah yang kemudian harus memikul kewajiban untuk memberikan pendidikan dasar bagi warganya yang tidak mampu.

Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen telah menyatakan dengan tegas pada Pasal 31 Ayat (2), "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Hal tersebut dipertegas di Ayat (4), "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Begitu pula dengan sejumlah Pasal dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab utama pendidikan dasar rakyat bersama-sama masyarakat.

Pada era otonomi daerah ternyata perkembangan kebijakan publik sudah mengarah kepada kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan ini sangat tergantung kepada pemimpin daerah yang merupakan representasi pemerintah di daerah.